BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penenelitian ini penulis memperoleh pijakan dari berbagai teori, konsep dan pendekatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya berguna dalam proses analisa masalah. Hal ini bertujuan agar alur penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Bab I, konsep dan teori serta pendekatan yang akan diuraikan dalam Bab II ini memiliki relevansi terhadap masalah yang akan diteliti.

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang tidak lepas dari politik yang memiliki sejumlah fokus kajian antara lain:

1. Hubungan-- saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi, hutang dan ketergantungan Dunia Ketiga, perdagangan internasional, ketidaksetaraan, identitas politik dan kewarganegaraan model baru, rezim, komunitas negara-negara internasional, anarki, kerjasama ekonomi regional, keseimbangan kekuasaaan, demokratisasi, keamanan pasca Perang Dingin;
2. Aktor—negara-bangsa, perusahaan transnasional, pasar modal, organisasi non-pemerintah, masyarakat politik supra-nasional dan sub-nasional, pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru, G7, IMF-Bank Dunia;

3. Isu-isu empiris—globalisasi dan isolasi, hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, persoalan perempuan, konservasi lingkungan, aids, narkoba, kejahatan terorganisir;
4. Isu-isu filsafat—permasalah epistemologi, ontologi dan metodologi, perspektif gender, perdebatan antar paradigma, etika dan kebijakan luar negeri (Burchill& Linklater, 2009:12).

Hubungan Internasional adalah mecakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung dengan baik secara kelompok, maupun perorangan dari suatu negara, yang melakukan interaksi resmi, maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi, maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 1993:3).

Menurut Perwita dan Yani, menjelaskanHubungan Internasional sebagai berikut:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atauanggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lainyang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasionalmerupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan danbertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasionalsehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yangmenutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita& Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> “Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studitentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. TerjadinyaHubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanyasaling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalammasyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanyasuatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”(2005: 3-4).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat *high-politics* seperti keamanan, militer, perang dan politik. Namun, mulai berangsur bergeser kepada isu *low-politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, Hak Asasi Manusia dan terorisme.

Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yanidalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> “Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal ituberdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalamiperkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanyamemperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain ituHubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanyadilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negarajuga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional” (2005: 7-8).

2.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional lahir karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat dunia terhadap suatu wadah untuk melaksanakan kerjasama internasional, dengan kata lain negara-negara perlu menyadari perlu adanya organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Organisasi internasional awalnya terjadi ketika terbentuk kesepakatan antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian.

2.2.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dapat dicatat bahwa ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 1987:10).

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara

pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002, 93-94).

Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut: (Rudy, 2002: 94-97).

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization* / IGO) dan organisasi internasional nonpemerintah (*non-governmental organization* / NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan Luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*).

7. Bentuk dan Pola Kerja sama: kerja sama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *institutionalized alliance* dan kerja sama fungsional (*funcitional cooperation*).
8. Fungsi Organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. Organisasi administratif, yaitu organisasi yangsepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administartif.

Organisasi peradilan (*judical organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

2.2.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut Clive Archer dalam buku *"InternationalOrganization"*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
   a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasionaldengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.

b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
   a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
   b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (1983:66).

Berdasarkan paparan klasifikasi organisasi internasional diatas maka PEMSEA termasuk dalam kategori *International Governmental Organizations* (IGO) dengan anggotanya berasal dari wakil-wakil pemerintah dan memiliki keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu yakni Negara-negara yang memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan di Asia Timur.

2.2.2.1 *International Governmental Organizations* (IGOs)

Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (*International Governmental Organizations*) yang lazim disebut IGOs. Anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik (Rudy, 2005:5).

Struktur lembaga IGOs memiliki pola khusus, misalnya dengan adanya pegawai-pegawai permanen yang dipimpin oleh orang-orang profesional, dimana birokrasi-birokrasi permanen ini disebut sekretariat. Karyawannya dapat dianggap sebagai pegawai sipil internasional, dan diharapkan dapat mengembangkan kesetiaan yang bersifat supranasional atau kesetiaan terhadap organisasi dan bukan terhadap negaranya.

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi : organisasi internasional antarpemerintah *(international governmental organization/IGO)* dan organisasi internasional nonpemerintahan *(nongovernmental organization / NGO).*
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan : organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (oprasional) organisasi, seperti bidang ekonomi,lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain – lain.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi : organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global – umum, globalkhusus, regional - umum dan regional – khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan) : organisasi supranasional danorgaisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi: organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif;dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut

penyelesaiansengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketantuan internasional dan perjanjian internasional) (2005:7-10).

Menurut Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe dalam buku *"Introduction to International Relations: Power and Justice"*, IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum. Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas. Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum. Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosialekonominya berskala luas.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas. Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, serta organisasi militer/pertahanan (1999: 281).

2.2.3 Teori Peranan Organisasi Internasional

Stuktur yang terdapat dalam organisasi yang memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian , serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 1981:221).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut , sang pelaku peran baik itu individu maupun organiasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun stuktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial. Posisi merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi, sedangkan peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu,

tanggung jawab, dan lainnya), dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Coser dan Rosenberg, 1976: 232-255;294).

Peranan sendiri merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari pelaku yang dapat berwujud sebagai perorangan sampai kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira, 1987: 32).

Ada dua peran utama yang dapat diidentifikasikan dari organisasi internasional di dalam sistem internasional, antara lain:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.

Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu: (1) Inisiator, (2) Fasilitator, (3) Mediator, (4) rekonsiliator, (5) Determinator. (Pareira, 1999: 135).

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Viotti & Kauppi, 1999: 228).

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan yang hendak dicapai, berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional itu antara lain: (Perwita & Yani, 2005:97)

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang dilakukan antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.

2.3 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2011: 58).

Masalah utama dari lingkugan hidup adalah pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut umumnya mempunyai sifat racun (toksin) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksinitas daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.Ancaman yang muncul terhadap lingkungan hidup berasal dari dua jenis, yaitu ancaman yang alamiah dan ulah tangan manusia. Siklus dari unsur-unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup membentuk keseimbangan tersendiri dan keseimbangan itu akan berubah ketika mendapat pengaruh dari dua jenis ancaman itu (Rudy, 2011: 58).

Perubahan-perubahan yang brlangsung dalam ekosistem dan biosfir, seperti perubahan yang mempengaruhi siklus air, merefleksikan ancaman-ancaman terhadap lingkungan global. Perubahan dalam siklus air merupakan ancaman paling utama, karena perubahan ini akan mempengaruhi iklim global pada umumnya. Sejumlah ancaman dan resiko lingkungan hidup global pada umumnya. Sejumlah ancaman dan resiko lingkungan hidup global dapat dikategorikan sebagai berasal dari perubahan iklim global.

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup global, dilakukan berbagai tindakan yang diprakarsai organisasi-organisasi internasional. Di antaranya Konferensi Lingkungan Hidup Dunia pada tahun 1972 di Stockholm yang antara lain mengahasilkan pendirian sebuah badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environmental*

Programme(UNEP).Konferensi ini merupakan kesempatan pertama membicarakan isu lingkungan hidup secara internasional oleh berbagai aktor global. Sejak itu permasalahan lingkungan hidup benar-benar mengemuka menjadi sebuah isu global lewat berbagai arena dan agenda pembicaraan internasional (Rudy, 2011: 58).

Tahun 1980an disebut sebagai "dekade penemuan lingkungan". Isu hubungan tuntutan sosial dan ekonomi penduduk dan lingkungan alam untuk pertama kali dibicarakan dengan cara ilmiah. Tanda yang dapat dirasakan mengenai meningkatnya perhatian dunia adalah Konferensi Puncak (Earth Summit) di Rio de Jeneiro pada tahun 1992 yang disponsori PBB. Lebih dari seratus kepala negara dan 30.000 birokrat dan wakil organisasi non-pemerintah bertemu membicarakan 24 juta halaman dokumen persiapan dan untuk membuat keputusan yang luas menyangkut masa depan lingkungan global (Rudy, 2011: 58).

2.3.1 *Green Political Theory* (Teori Politik Hijau)

Teori Hijau (*Green Theory*) muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan sejak 1970an sampai sekarang. Sejarah yang menjelaskan tentang lingkungan hidup telah diwariskan sejak abad 12. Hal ini dibuktikan dengan penebangan kayu hutan Babilonia, Yunani dan Italia ketika peradaban manusia baru berkembang serta adanya konservasi minyak di Mediterania dan peradaban Cina.*Green Politics* bermakna ideologi politis, yang sangat kental dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan hidup,dan demokrasi partisipatoris. Konsep

green politics mulai dibangun dalam bentuk gerakan konservatif sejak lahirnya Sierra Club di San Fransisco, tahun 1892. Klub tersebut menitikberatkan pada upaya-upaya konservasi dan preservasi alam. Politik lingkungan juga tak terlepas dari gerakan environmentalis Jerman, ditandai dengan berdirinya *German Green Party* (GGP) tahun 1980 (Matthew, 2001: 238).

Matthew membedakan antara environmentalism dengan *green theory*. Secara luas, environmentalis menerima *framework* dari keberadaan struktur politik, sosial, ekonomi dan normatif dari politik dunia dan berusaha menyelaraskan isu lingkungan dengannya. Berbeda dengan *green theory* yang menganggap struktur tersebut sebagai alasan utama krisis lingkungan dan berpendapat bahwa struktur ini haruslah mendapat tantangan. Dalam Hubungan Internasional posisi environmentalis tidaklah ada bedanya, mereka tetap menerima adanya negara dan struktur politik yang ada, dan bahwa negara akan memberikan perhatian yang serius terhadap isu lingkungan. Sedang *green theory* cenderung skeptis terhadap negara, bahwa negara akan memberikan respon seperti yang dikemukakan oleh environmentalis (Matthew, 2001: 236).

Asumsi dasar dari *green theory* adalah, yang pertama, menolak *anthropocentric* atau *human-centered* dan menitikberat pada pendekatan *ecocentric*. Pendekatan ini berfokus pada komunitas biotik sebagai satu keseluruhan biosfer dan stabilitas komposisi ekologis. Pembangunan dan penggunaan sumberdaya alam oleh manusia haruslah bertanggungjawab dan ada usaha untuk menjaga keseimbangan alam (Matthew, 2001: 238).

Yang kedua adalah perlunya pembatasan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat menambah konsumsi manusia. Konsumsi manusia akan meminta pemenuhannya terhadap alam sehingga sedikit demi sedikit alam akan semakin rusak. Pembangunan yang dilakukan demi pertumbuhan populasi manusia juga dapat merusak lingkungan yang mengancam kehidupan manusia di masa yang akan datang. (diakses dari http://mars-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-46528-Teori%20Hubungan%20 Internasion Teori%20Hubungan%20Internasional%20Week%209_Green%20Perspective.html pada 17 Mei 2012 pukul 09.15 Wib)

Menurut Eckersley dalam Burchill & Linklater (2009) menyatakan bahwa karakteristik Politik Hijau adalah ekosentrisme –sebuah penolakan terhadap pandangan dunia antroposentris yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem semua makhluk hidup (Burchill & Linklater, 2009: 338). Sementara Goodin menyatakan bahwa 'nilai teori hijau' , bahwa sumber nilai segala sesuatu adalah fakta bahwa segala sesuatu itu punya sejarah yang tercipta oleh proses alami, bukan rekayasa manusia (Burchill & Linklater, 2009: 338).

Dobson dalam buku yang sama juga menjelaskan karakteristik Politik Hijau. Pertama penolakan atas antroposentrisme, seperti yang diuraikan Eckersley. Selanjutnya, argumentasi 'pembatasan pertumbuhan' terhadap hakekat krisis lingkungan. Politik hijau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang berlangusng sepanjang dua abad terakhir merupakan

penyebab utama krisis lingkungan yang ada sekarang ini (Burchill & Linklater, 2009: 338).

2.4 Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup merupakan isu terbaru dalam studi hubungan internasional. Runtuhnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan dalam konstelasi politik internasional. Pada perkembangan ini isu Lingkungan Hidup termasuk dalam isu-isu global sebagai akibat daripada proses globalisme, dimana keterlibatan untuk permasalahan lingkungan hidup telah melibatkan banyak negara oleh karena sifatnya yang *transboundary*. Isu Lingkungan Hidup juga dapat dikategorikan kedalam Hubungan Internasional Kontemporer.

2.4.1 P engertian Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai:

> "Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004: 10). Komponen yang berada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai

sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004: 4). Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang mensyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1991: 1-2).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Sehingga kualitas hidup yang ingin dicapai atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut terancam tidak dapat dinikmati secara optimal bagi kehidupan selanjutnya.

Namun begitu tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap permasalah lingkungan juga mengakibatkan terancamnya kelestarian lingkungan. Karena pola pikir yang terbentuk hanya sebatas pemanfaatan tidak untuk kelestarian bagi generasi selanjutnya.

2.4.2 Lingkungan Hidup sebagai *Transboundary Issues*

Isu lingkungan menjadi sebuah isu yang lintas batas, hal ini disebabkan karena: (1) sumber daya yang ada bergerak melalui banyak negara, (2)

kegiatanyang dilakukan di lingkungan laut, seperti pengiriman barang, memancing dan pergerakan migrasi spesies asing dan, melibatkan beberapa negara, dan (3) laut adalah media dimana polutan relatif mudah menular. Penyebab dan / atau dampak dari pada pergerakan yang terjadi melibatkan lebih dari satu negara dan respon yng dilakukan harus multilateral atau regional.

Saat ini tengah dihadapkan pada era globalisasi di abad 21 yakni dampak dari isu-isu lintas batas akan menjadi semakin kritis. Isu lintas batas meliputi, antara lain (PEMSEA, 2003: 30) :

1. Polusi
   (1) Proyeksi pertumbuhan dalam produksi juga akan menyebabkan meningkatnya limbah industri dan domestik, sumber utama pencemaran di wilayah laut.
   (2) Saat ini tingkat pengolahan limbah di wilayah laut sangat rendah. Sebagai contoh, lebih dari 10% dari komponen organik dihilangkan dengan pengolahan limbah di negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Hal ini menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan tingkat lintas batas negara.
   (3) Semakin meningkatnya limpasan daripada kegiatan yang beragam seperti pertanian, pertambangan, *timbering* dan pembukaan lahan, serta pembangunan perumahan komersial.
   (4) Perdagangan internasional diperkirakan meningkat tiga kali lipat dalam 20 tahun ke depan, antara 80 dan 90%. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas pengiriman barang. Sekitar 300 tumpahan dengan lebih dari 200 juta galon

minyak tumpah di wilayah Asia Timur sejak pertengahan 1960-an. Meskipun angka-angka ini sebagian besar menurun selama dekade tersebut, peningkatan proyeksi lalu lintas pelayaran meningkatkan tumpahan minyak.

2. Pengenalan spesies asing

Pelayaran internasional juga mentransfer sekitar 10 miliar ton *ballast water* (air pemberat) di seluruh dunia. Padahal diperlukan untuk keselamatan kapal, ballast water dapat berisi organisme laut yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa negara telah diperkenalkan dengan *ballast water* namun telah terkontaminasi kerang. Sebagai kapal yang memiliki kapasitas lebih besar dan lebih cepat, dengan meningkatnya perdagangan maritim, ke depannya masalah ini akan menjadi lebih akut.

3. Eksploitasi berlebihan

(1) Sebagian besar spesies pelagis kecil dari perikanan tangkap di wilayah Cina Selatan, telah sepenuhnya dieksploitasi. Ada juga indikasi bahwa stok dalam jumlah besar akan pelagis disebuah negara telah dieksploitasi penuh.

(2) Penangkapan *by-catch*, diperkirakan lebih dari seperempat dari total tangkapan laut, memberikan kontribusi terhadap eksploitasi yang tidak efisien dan boros.

4. Penangkapan ikan yang merusak

Praktek penangkapan ikan yang merusak di satu negara dapat berdampak pada kelangsungan hidup ikan yang bermigrasi di negara lain. Praktek ini

mencakup memancing dengan bahan peledak, dengan jaring *trawl* dan rantai, serta menggunakan *cyanide* untuk ikan setrum sehingga mereka bisa ditangkap dalam keadaan hidup dengan perdagangan senilai $ 1 miliar per tahun juga praktek lainnya yang mendegradasi habitat ikan seperti terumbu karang dan mangrove.

5. Perubahan pola konsumsi dan penggunaan serta perdagangan internasional

   (1) Permintaan global meningkat untuk udang sebagian besar dipenuhi oleh ekspor dari kawasan laut tertentu yang terkenal akan hasil udangnya seperti kawasan laut di Asia Timur. Meskipun dampak lingkungannya begitu besar melalui deforestasi mangrove, pengenalan spesies udang (dan patogen terkait) dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dari bahan kimia yang terkait dengan budidaya udang.

   (2) Degradasi habitat di wilayah pesisir berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini menyebabkan dampak lintas batas negara karena saling ketergantungan satu sama lain.Terlebih pada ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Selain itu, wilayah pesisir dan laut memberikan kontribusi yang signifikan untuk perikanan bersama kepada negara pantai terdekat yang saling terhubung (PEMSEA, 2003).

2.5 Ekosistem

Berbicara mengenai Lingkungan Hidup tentu tidak terlepas dari sistem ekologi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Ekosistem menurut Benny Joseph dalam bukunya *"Environment Studies"* menngemukakan ekosistem sebagai:

> "Ekosistem adalahkumpulanbiotiktanaman, hewan, dan mikroba, bila digabungkan dalam lingkunganfisikokimia.Dalamekosistemterdapat pngelolaan kehidupan secara biologis olehtigakelompok, yakniprodusen, konsumen, dan dekomposer/daur ulang" (Joseph,2005:73).

Didalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan ekosistem sebagai:

> "Ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup".

Ekosistem kemudian terbagi lagi menjadi ekosistem darat (hutan hujan, padang rumput,sabana, gurun, taiga, tundra, hutan gugur dan karst/batu gamping) dan ekosistem air (laut, tawar, payau).

2.5.1 Ekosistem Laut

Ekosistem laut sebagai salah satu ekosistem di dunia, merupakan suatu dunia sendiri, di mana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen-kompenen kehidupan yang serupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem daratan Indonesia salah satunya pemilik ekosistem laut terbesar, merupakan sebuah Negara Kepulauan yang daerah perairannya lebih luas daripada daratannya. Ekosistem air laut dibedakan atas ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuari (muara), dan ekosistem terumbu karang (Pusat Pendidikan Lingkungan

Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dari website resmi http://pplhpuntondo.org/program/ekosistem-laut/ diakses pada 8 Febuari 2012).

2.5.1.1 Ekosistem Terumbu Karang (*Coral Reefs*)

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga dengan demikian secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Hal ini ditambah lagi dengan letak wilayah Indonesia yang strategis di wilayah tropis. Hamparan laut yang luas merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumberdaya laut yang memiliki keragaman baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya lainnya.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka dan sensitif sekali. Jangankan dirusak, diambil sebuah saja, maka rusaklah keutuhannya. Ini dikarenakan kehidupan di terumbu karang didasari oleh hubungan saling tergantung antara ribuan makhluk. Rantai makanan adalah salah satu dari bentuk hubungan tersebut. Tidak cuma itu proses terciptanya pun tidak mudah. Terumbu karang membutuhkan waktu berjuta tahun hingga dapat tercipta secara utuh dan indah. Terumbu karang perairan Indonesia terbentuk sejak 450 tahun silam (diakses dari http:id.terumbukarang.org//Pulau_Rubiah pada 1 Juni 2012 pukul 22.00 Wib).

Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis. Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar dan

sirkulasi air yang lancar serta terhindar dari proses sedimentasi. Ekosistem terumbu karang memiliki kemampuan yang baik dalam memperbaiki bagian yang rusak, bila karakteristik habitat dari berbagai macam formasi terumbu karang dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya terpelihara dengan baik. Seperti ekosistem lainnya, terumbu karang tidak memerlukan campur tangan atau manipulasi langsung manusia untuk kelangsungan hidupnya (Dahuri et al, 2004: 17).

Dalam proses saling makan, berbagai biota laut yang hidup dalam lingkungan komunitas terumbu ada yang bersimbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang berbentuk hubungan komensalisme dengan terumbu karang antara lain hewan-hewan Decapoda (*Crustaceae*) misalnya udang dan rajungan (*Portunus spp*) serta berbagai jenis ikan karang membutuhkan keberadaan terumbu karang sebagai tempat berteduh (*shelter*) dan tempat menyelinap (sembunyi) untuk melindungi diri dari serangan predator, serta tempat mencari makan berupa plankton dan serasah. Organisme lain yang juga bisa ditemui dilingkungan terumbu karang antara lain bulu babi (*Diadema*), hewan bangsa kerang-kerangan (*Pelecypoda*), uburubur (*jellyfish*), bintang mengular (*Ophiuroidea*) bintang laut (*Asterias sp*), sea anemones, cumi (*loligo sp*), gurita (*octopus spp*), dan sebagainya (Wibisono, 2005: 29).

2.5.1.2 Ekosistem Pantai/Pesisir (*Coastal*)

Pengertian dan batasan mengenai ekosistem pesisir secara baku sampaisaat ini belum ada. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa

wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu: batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (Bengen, 2004: 20).

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan laut, kearah daratan meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembasan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Beatley, et al, 1994, dalam Bengen 2004: 22).

Dari segi aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung didalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia dari wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain (SECEM, 2009: 23).

Ditinjau dari segi aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (*open access*). Hal ini justru terkadang membuat rasa tanggung jawab bagi pengelolaan wilayah pesisir dan laut terabaikan. Dengan karakteristik yang khas dan *open access* tersebut, maka setiap pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumber daya tersebut rentan terhadap konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan

sumber daya serta sangat mudah terjadinya degradasi lingkungan dan *problem* eksternalitas (SECEM, 2009: 23).

Namun perlu digaris bawahi bahwa wilayah pesisir ini sangat erat kaitannya dengan ekosistem laut. Karena merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut. Keduanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Ekosistem laut dapat terjaga ketika ekosistem pesisir dapat dijaga dengan baik. Sehingga konsep pengelolaannya harus sinergi antara keduanya.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional(SECEM, 2009: 29).

2.6 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat

yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit.

Maka, dengan adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut SD akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987 Pembangunan berkelanjutan adalahterjemahan dari Bahasa Inggris *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Laporan dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian “pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”. Dalam pandangan ini, keragaman

“pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas (diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/pemb.berkelanjutan pada 1 Juni 2012 pukul 22.00 Wib).

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah a) terpeliharanya proses ekologi yang esensial, b) tersedianya sumberdaya yang cukup, dan c) lingkungan sosial- budaya dan ekonomi yang sesuai (Otto, 2004 : 161).

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Sudarmadji, 2008: 57).

Meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju, maka generasi anak-anak kitapun minimal bisa mencapai kesejahteraan yang setingkat, demikian pula dengan cucu-cucu kita. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Itulah yang dimaksud dengan keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi saja ternyata tidak cukup.

Ekonomi berlangsung di dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat terjadi juga pertumbuhan yang memerlukan keberlanjutan. Keberlanjutan masyarakat mensyaratkan adanya keutuhan, kondisi dan hubungan jaringan antar masyarakat yang terpelihara terus menerus, sehingga dijaga agar jangan sampai terjadi bahwa masyarakat yang sekarang lahir 5 tahun kemudian berantakan dan bubar. Masyarakat yang sustainable, masyarakat yang berlanjut, tidak mengenal konflik sosial, dan juga tidak mengenal disintegrasi sosial.

Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, lakilaki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut dengan 'pembangunan manusia'. Ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (*equity*), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan. (Firdaus, 1998: 77).

Pembangunan Berkelanjutan itu mempunyai 3 kaki, kaki keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi tidak bisa jalan kalau keberlanjutan sosial berantakan. Keberlanjutan ekonomi dan sosial tidak bisa jalan juga kalau lingkungan berantakan, pertama adalah dengan menempatkan modal alam sebagai faktor utama. Jika cara berpikir sebelumnya adalah ekonomi menguasai, sosial penting nomor 2 dan lingkungan penting nomor 3, maka sekarang harus dibalik. Sekarang yang nomor 1 adalah modal alam, sebab alam sudah berada dalam keadaan yang berbahaya, (Prof. Dr. Emil Salim, 2003).

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang ekspoitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Sutamihardja (2004: 43), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenaration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya (Sutamihardja, 2004: 43).

Tabel. 2.1 Pemikiran-pemikiran tentang syarat-syarat tercapainya proses pembangunan berkelanjutan :

DIMENSI	**Brundtland, G.H 1987**	**ICPOL.1996**	**Becker, F.et al. 1997**
Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua	Keadilan sosial, kesetaraan gender, rasa aman, menghargai diversitas budaya	Penekanan pada proses pertumuhan sosial yang dinamis, keadilan sosial dan pemerataan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Ekonomi kesejahteraan	Ekonomi kesejahteraan
Lingkungan	Lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang	Keseimbangan lingkungan yang sehat	Lingkungan adalah dimensi sentral dalam proses sosial

(sumber: Gondokusumo 2005 dalam Budhy 2005 : 407)

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota tersebut, proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemikiran pemikiran diatas dan dengan pemahaman bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah ancaman utama pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan pada intinya merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Didalamnya terkandung dua gagasan penting:

1. Gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia.
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan (Djajadiningrat, 2001: 27).

Prinsip-prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diringkas menjadi empat hal yaitu, pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi perspektif jangka panjang:

1. Pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial.

   Kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan ialah menjawab pertanyaan tentang pemerataan untuk generasi masa kini dan generasi mendatang. Strategi pembangunan harus dilandasi “premis” pada hal seperti, lebih meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan perempuan, dan pada pemerataan

ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Akan tetapi, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Karena pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyentuh (global), kesenjangan pendapatan negara-negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya menjadi kepedulian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini harus selalu mengindahkan generasi masa datang untuk mencapai kebutuhannya.

2. Pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman.

   Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan (ekosistem). Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

3. Pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif.

   Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang

kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial, dan dengan menggunakan pengertian ini melaksanakan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan, keberlanjutan masa depan dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama kelembagaan.

4. Pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang.

   Masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi-asumsi normal dalam prosedur "pemotongan" (*discounting*). Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasikan pemikiran para pengambil keputusan ekonomi (Djajadiningrat, 2001: 11-12).

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian hal-hal di bawah ini:

1. Keberlangsungan ekologis.

   Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup.

2. Keberlanjutan ekonomi.

   Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal yang utama yang keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan keberlanjutan aspek lainnya. Kedua aspek tersebut adalah keberlanjutan ekonomi makro, menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan

mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional, keberlanjutan ekonomi sektoral, penyesuaian kebijaksanaan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah.

3. Keberlanjutan sosial-budaya.

   Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial mempunyai empat sasaran, yaitu stabilitas penduduk, memenuhi kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

4. Keberlanjutan politik.

   Tujuan dari keberlanjutan politik adalah, pertama, menghormati hak asasi manusia (HAM). Kedua, demokrasi. Dan yang ketiga, kepastian ekologis.

5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

   Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang secara langsung dan secara tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa (Djajadiningrat, 2001: 32).

Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan yang merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat

area yakni: (1) pelayanan masyarakat, (2) pengelolaan limbah, (3) pengelolaan sumberdaya tanah, dan (4) pengelolaan sumberdaya alam (Mitchell, et al, 2007: 33).

Pengelolaan sumberdaya alam merupakan agenda 21 Indonesia. Tiga sub-agenda dirumuskan dalam agenda ini yakni: (1) Konservasi keanekaragaman Hayati, (2) Pengembangan bioteknologi, dan (3) Pengelolaan Terpadu wilayah pesisir dan lautan (Mitchell, et al, 2007: 33).

2.7 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, mendefinisikan Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut sebagai:

> "Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pencemaran dan/atau perusakan laut".

2.7.1 Pengendalian Kerusakan Terumbu Karang

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang mendefinisikan pengendalian kerusakan terumbu karang sebagai:

> "bahwa salah satu upaya untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria baku kerusakan; Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang; Status kondisi terumbu karang adalah tingkatan kondisi terumbu karang pada suatu lokasi tertentu dalam waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu kerusakan terumbu karang dengan menggunakan prosentase luas tutupan terumbu karang yang hidup".

Penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan terumbu karang adalah sebagai berikut:

1. Sedimentasi

   Konstruksi di daratan dan sepanjang pantai, penambangan atau pertanian di daerah aliran sungai ataupun penebangan hutan tropis menyebabkan tanah mengalami erosi dan terbawa melalui aliran sungai ke laut dan terumbu karang. Kotoran-kotoran, lumpur ataupun pasir-pasir ini dapat membuat air menjadi kotor dan tidak jernih lagi sehingga karang tidak dapat bertahan hidup karena kurangnya cahaya.

   Hutan mangrove dan padang lamun yang berfungsi sebagai penyaring juga menjadi rusak dan menyebabkan sedimen dapat mencapai terumbu karang. Penebangan hutan mangrove untuk keperluan kayu bakar dapat merubah area hutan mangrove tesebut menjadi pantai terbuka. Dengan membuka tambak-tambak udang dapat merusak tempat penyediaan udang alami.

2. Penangkapan dengan bahan Peledak

   Penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan oleh nelayan akan mengakibatkan penangkapan ikan secara berlebihan, sehingga menyebabkan tangkapan ikan akan berkurang dimasa berikutnya. Penggunaan Kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan yang besar, sehingga membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya.

3. Aliran Drainase

Aliran drainase yang mengandung pupuk dan kotoran yang terbuang ke perairan pantaiyang mendorong pertumbuhan *algae* yang akan menghambat pertumbuhan polip karang, mengurangi asupan cahaya dan oksigen. Penangkapan secara berlebihan membuat masalah ini bertambah buruk karena ikan-ikan yang biasanya makan *algae* juga ikuk tertangkap.

4. Penangkapan Ikan dengan Sianida

   Kapal-kapal penangkap ikan seringkali menggunakan Sianida dan racun-racun lain untuk menangkap ikan-ikan karang yang berharga. Metode ini acap digunakan untuk menangkap ikan-ikan tropis untuk akuarium dan sekarang digunakan untuk menangkap ikan-ikan sebagai konsumsi restoran-restoran yang memakai ikan hidup.

5. Pengumpulan dan Pengerukan

   Pengambilan karang untuk digunakan sebagai bahan baku konstruksi atau dijual untuk cinderamata juga merusak terumbu karang. Demikian pula pengerukan dan pengeboman karang untuk konstruksi di daerah terumbu karang.

6. Pencemaran Air.

   Produk-produk minyak bumi dan kimia lain yang dibuang di dekat perairan pantai, pada akhirnya akan mencapai terumbu karang. Bahan-bahan pencemar ini akan meracuni polip karang dan biota laut lainnya.

7. Pengelolaan tempat rekreasi.

   Pengelolaan tempat rekreasi di wilayah pesisir yang tidak memperhatikan lingkungan, seperti penyewaan kapal, peralatan pemancingan dan

penyelaman seringkali menyebabkan rusaknya terumbu karang. Pelemparan jangkar ke karang dapat menghancurkan dan mematahkan terumbu karang. Para wisatawan yang mengambil, mengumpulkan, menendang, dan berjalan di karang ikut menyumbang terjadinya kerusakan terumbu karang.

8. Pemanasan global

   Terumbu karang juga terancam oleh pemanasan global. Pemutihaan terumbu karng meningkat selama dua dekade terakhir, masa dimana bumi mengalami beberapa kali suhu tepanas dalam sejarah. Ketika suhu laut meningkat sangat tinggi, polip karang kehilangan *algae* simbiotik didalamnya, sehingga mengubah warna mereka menjadi putih dan akhirnya mati. Pemanasan global juga mengakibat cuaca ekstrim sukar diperkirakan, seperti badai tropis yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik ekosistem terumbu karang yang sangat besar. Meningkatnya permukaan laut juga menjadi ancaman serius bagi terumbu karang dan pulau-pulau kecil maupun atol.

Sebagai salah satu upaya pencegahan; penanggulangan dan pemulihan kerusakan terumbu karang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara No.02 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, yaitu:

Pencegahan dan Penanggulangan

1. Peningkatan Kesadaran dan Partipasi Masyarakat

Adalah upaya untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan terumbu karang secara lestari, seperti meningkatkan kesadaran mereka akan peranan penting terumbu karang, seperti sebagai tempat pengembangan wisata bahari, bahan baku obat-obatan, kosmetika, bahan makanan dan lain-lain. Penting juga untuk menanamkan arti dan manfaat terumbu karang bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir sejak masa kanak-kanak.

2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

a. Membina masyarakat untuk melakukan kegiatan alternatif seperti budidaya, pemandu wisata dan usaha kerajinan tangan yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pembinaan ini disertai dengan bantuan pendanaan yang disalurkan melalui berbagai sistem yang telah ada dan tidak membebani masyarakat.

b. Menerapkan pengetahuan dan teknologi rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang agar dapat dimanfaatkan secara lestari.

3. Pengembangan Kelembagaan.

a. Memperkuat koordinasi antar instansi yang berperan dalam penanganan terumbu karang baik pengelola kawasan, aparat keamanan, pemanfaat sumber daya dan pemerhati lingkungan.

b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaandan teknik rehabilitasi terumbu karang.

4. Penelitian, Monitoring dan Evaluasi

   Pemantauan kegiatan masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan terumbu karang. Dalam kaitan ini akan dibentuk sistem jaringan pemantauan dan informasi terumbu karang dengan membangun simpul-simpul di beberapa propinsi. Kegiatan ini akan diawasi langsung oleh LIPI yang telah memiliki stasiun-stasiun di beberapa tempat, seperti : Biak, Ambon dan Lombok.

5. Penegakan Hukum

   Komponen ini dipandang sangat penting sebagai salah satu komponen kunci yang harus dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan komponen penegakan hukum. Salah satu peranan masyarakat dalam pengamanan terumbu karang secara langsung adalah sebagai pengamat terumbu karang atau reef watcher, dimana mereka berkewajiban meneruskan informasi kepada penegak hukum mengenai pelanggaran yang merusak terumbu karang di daerahnya.

Pemulihan

Pemulihan kerusakan terumbu karang merupakan upaya yang paling sulit untuk dilakukan, serta memakan biaya tinggi dan waktu yang cukup lama. Upaya pemulihan yang bisa dilakukan adalah zonasi dan rehabilitasi terumbu karang.

1. Zonasi

   Pengelolaan zonasi pesisir bertujuan untuk memperbaiki ekosistem pesisir yang sudah rusak. Pada prinsipnya wilayah pesisir dipetakan untuk kemudian direncanakan strategi pemulihan dan prioritas pemulihan yang diharapkan. Pembagian zonasi pesisir dapat berupa zona penangkapan ikan, zona konservasi maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan/pemanfaatan wilayah tersebut, disertai dengan zona penyangga karena sulit untuk membatasi zona-zona yang telah ditetapkan di laut. Ekosistem terumbu karang dapat dipulihkan dengan memasukkannya ke dalam zona konservasi yang tidak dapat diganggu oleh aktivitas masyarakat sehingga dapat tumbuh dan pulih secara alami.

2. Rehabilitasi

   Pemulihan kerusakan terumbu karang dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi aktif, seperti meningkatkan populasi karang, mengurangi *algae* yang hidup bebas, serta meningkatkan ikan-ikan karang.

a. Meningkatkan populasi karang

   Peningkatan populasi karang dapat dilakukan dengan meningkatkan rekruitmen, yaitu membiarkan benih karang yang hidup menempel pada permukaan benda yang bersih dan halus dengan pori-pori kecil atau liang

untuk berlindung; menambah migrasi melalui transplantasi, serta mengurangi mortalitas dengan mencegahnya dari kerusakan fisik, penyakit, hama dan kompetisi.

b. Mengurangi alga hidup yang bebas

Pengurangan populasi alga dapat dilakukan dengan cara membersihkan karang dari alga dan meningkatkan hewan pemangsa alga.

c. Meningkatkan ikan-ikan karang

Populasi ikan karang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan rekruitmen, yaitu dengan meningkatkan ikan herbivora dan merehabilitasi padang lamun sebagai pelindung bagi ikan-ikan kecil; meningkatkan migrasi atau menambah stok ikan, serta menurunkan mortalitas jenis ikan favorit.